



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMMAD AINUR RAHMAN**
2. Jabatan : **ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESRA**
3. NHK : **160112**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **2.075.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 310 m2/200 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 975.000.000
2. Tanah Seluas 121 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 146 m2/182 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **250.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV YARIS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOTOR, VESPA SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **61.000.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. **----****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **24.000.000****F. HARTA LAINNYA** Rp. **8.500.000****Sub Total** Rp. **2.418.500.000****III. HUTANG** Rp. **----****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **2.418.500.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMMAD AINUR RAHMAN**
2. Jabatan : **ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESRA**
3. NHK : **160112**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 2.475.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 310 m2/200 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 975.000.000
2. Tanah Seluas 121 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 146 m2/182 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 350.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV SEDAN Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. MOTOR, VESPA SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 61.000.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 24.000.000****F. HARTA LAINNYA****Rp. 8.500.000****Sub Total****Rp. 2.918.500.000****III. HUTANG****Rp. ----****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 2.918.500.000**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.